

**BAB II**  
**DINAMIKA PERKEMBANGAN KEBIJAKAN ENERGI REPUBLIK REVOLUSI IRAN**  
**DARI PERIODE MASING-MASING KEPEMIMPINAN PRESIDEN REVOLUSI ISLAM**  
**IRAN**

Pasca perang dingin isu tentang teknologi nuklir ini juga selalu menjadi agenda hangat dalam berbagai perbincangan di forum-forum internasional karena keberadaannya ditakuti akan menghancurkan bukan saja manusia melainkan juga planet yang sebagai tempat tinggal manusia. Persaingan akan produksi senjata berbasis nuklir akan mengakibatkan yang dahsyat, karena secara khusus perang dapat digunakan untuk mempertahankan seluruh kesepakatan *wastphalia* sehingga pada masa depan perang akan berfungsi nyaris sama seperti fungsinya pada masa lalu.

Di era kontemporer saat ini keberadaan negara-negara yang memiliki teknologi nuklir terpusat pada negara-negara besar. Salah satu diantaranya adalah negara Republik Revolusi Islam Iran, isu nuklir Iran sebagai sebuah dilemma tentang hak (*right*) sebuah negara di *region* Timur Tengah (Middle East) merupakan perdebatan yang serius berkaitan tentang kelanjutan perdamaian dunia. Kepemilikan sistem energy nuklir oleh Israel mengundang kontroversi bagi negara-negara Timur Tengah, karena di wilayah tersebut Israel menjadi satu- satunya negara yang mempunyai teknologi persenjataan nuklir. Hal ini tidak menimbulkan keseimbangan kekuatan geopolitik di Timur Tengah.

Iran sebagai negara yang juga memiliki geostrategic di Timur Tengah, menjadi salah satu negara yang juga bermaksud untuk mengembangkan teknologi nuklir, walaupun masih dalam tahap pengembangan, Iran memperoleh respon keras bagi dunia internasional. Disisi lain keberadaan teknologi nuklir Iran memiliki catatan panjang sejarah hingga hari ini, dimulai pada masa pemerintahan Shah yang gagal, dan kembali bangkit pada akhir masa pemerintahan Ali Khomeini (1981 – 1989), kemudian pada masa pemerintahan Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997), hingga masa Mohammad Khatami (1997-2005). Ketiga era pemerintahan itu, memiliki penerapan kebijakan energi nuklir yang berbeda- beda yang semuanya itu memberi sumbangsih dalam pembangunan kebijakan energi nuklir di Iran.

Pada awalnya pengembangan nuklir Iran adalah dimulai dari pemerintahan Shah Pahlevi yang berambisus untuk mengembangkan teknologi nuklir yang bergantung pada teknologi nuklir Amerika Serikat dan Inggris. Ketika program Non-Proliferation Nuclear (NPT) ditekankan oleh perjanjian-perjanjian internasional, Iran mengarahkan pengembangan energy nuklir untuk keperluan listrik Pada tahun 1967, Program difokuskan kepada penelitian energy nuklir sebesar lima megawatt yang disuplai dari Amerika Serikat nuklir.<sup>14</sup> Menurut Akbar Etemad (Kepala Atomic Energy Organization of Iran (AEOI). Pada tahun

---

<sup>14</sup> <http://www.iranwatch.org/our-publications/weapon-program-background-report/history-irans-nuclear-program>

1974-1978, program nuklir telah dijalankan melalui penelitian-penelitian dan pendidikan di Universitas Teheran di Iran.<sup>15</sup>

Beberapa perjanjian mengawali pengembangan nuklir Iran yang berbasis energy dan tujuannya untuk mencapai pemasokan energy di negara tersebut. Pada tahun 1974, Shah menetapkan tujuan menghasilkan sekitar 23.000 megawatt daya listrik dari serangkaian stasiun tenaga nuklir dalam waktu dua puluh tahun. Sejumlah kontrak antara Iran dan pemasok nuklir di Eropa dan Amerika Serikat. Iran juga membuat kesepakatan dengan Kraftwerk Union (KWU, anak perusahaan Siemens) Jerman Barat untuk membangun dua reactor dengan kapasitas 1.200 megawatt di Bushehr, serta bernegosiasi dengan Perancis perusahaan Framatome untuk dua tambahan 900 reaktor megawatt.<sup>16</sup> Amerika Serikat telah menilai bahwa Teheran memiliki kapasitas teknologi dan industri untuk memproduksi senjata nuklir, namun belum menguasai semua teknologi yang diperlukan untuk membangun senjata tersebut.

#### **A. Pemerintahan Ali Khomeini (1981-1989)**

Setelah runtuhnya kekuasaan Shah Pahlvi pada November 1979, pergolakan politik setelah revolusi tidak berhenti hingga terjadi dua kali pergantian presiden yang dalam rentan waktu yang 1980-1981. Revolusi Iran pada tahun 1979 menandai pengembangan energy nuklir pemerintahan Shah gagal, ditambah lagi dengan perang Iran dan Irak yang mengakibatkan dua reaktor yang dalam tahap pembangunan dihancurkan oleh militer Irak. Perusahaan Siemens

---

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> **ibid**

---

mengundurkan diri dari proyek, sehingga program nuklir gagal terlaksana. Walaupun program pengembangan nuklir di era Shah Pahlevi dinilai gagal, akan tetapi proyek tersebut merupakan penentu posisi Iran dalam pengembangan teknologi nuklir pemerintahan selanjutnya.

Abolhassan Banisadr (4 Februari 1980-21 Juni 1981) menjadi presiden pertama setelah revolusi, tetapi pemerintahannya tidak bertahan lama hingga pada tanggal 22 Juni 1981 Banisadr dipaksa untuk turun dari kepemimpinannya. Kemudian kepresidenan jatuh pada Muhammad Ali Rajai (15 1981-30 Agustus 1981) yang terpilih dari Partai Republik Islam. Kepemimpinan Rajai tidak berlangsung lama, karena Rajai bersama perdana mentrinya dibunuh pada Agustus 1981.

Aliran politik Khomeini sangat terlihat dengan pandangan anti Amerika Serikat, dan anti- islam yang mendukung Amerika Serikat, begitu pula dengan seluruh pandangan-pandangan politik pemerintahan Shah. Pandangan politik membentuk geopolitik yang konfrotatif kepada negara-negara Teluk.<sup>17</sup> Pandangan politik Khomeini juga menjadi poin utama bagi pemberentian proyek pengembangan energy nuklir dan regenerasi program nuklir.

---

<sup>17</sup> Aida Maria Latorre, 2009, "*Role Of Revolutionary Leadership In Iran On Its Foreign Policy*", diunduh pada [http://etd.fcla.edu/CF/CFE0002726/Latorre\\_Aida\\_M\\_2009\\_08\\_MA.pdf](http://etd.fcla.edu/CF/CFE0002726/Latorre_Aida_M_2009_08_MA.pdf)

## 1. Politik Konfrontasi Iran di Negara Teluk dan Berakhirnya Program Nuklir

Politik konfrontasi tersebut merubah arah kerjasama Iran yang pada pemerintahan Shah bekerjasama dengan Amerika Serikat dan berubah partner kerjasamanya yaitu kepada Uni soviet. Pada saat yang sama Irak yang juga mengalami revolusi yang didukung oleh pemerintahan Amerika Serikat, sehingga menambah daftar musuh Iran di Timur Tengah. Politik konfrontasi tersebut menjadi perang dingin antara Iran dengan beberapa negara di Teluk terutama Irak. Iran juga banyak menggunakan konfrontasi di Timur Tengah dengan mendukung afiliasi pemberontak di Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi dengan mengebom kantor kedutaan dan aktifitas teroris lainnya.<sup>18</sup> Pada akhirnya Pemerintahan Khomeini hanya menghasilkan konfrontasi politik, ditambah lagi akses senjata legal yang juga ditutup, membuat Iran sulit untuk memegang peranan negara sentral di Timur Tengah.

Dalam masa kekuasaan Khomeini, Iran masih belum berfokus pada pembangunan nuklirnya kembali. Pada akhirnya program nuklir terbengkalai akibat politik konfrontasi. Khomeini juga mengancam akan menghukum mati para peneliti nuklir yang terlibat dalam pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, penghancuran fasilitas nuklir ini membawa juga kerugian pada sejumlah riset yang tengah dilakukakan. Iran terpaksa merugi enam miliar dollar, ongkos kerjasama dengan perusahaan Siemens dari Jerman. Demikian juga Iran harus

---

<sup>18</sup> Takeyh, 2006, Ray. Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic. New York: Times Books, hlm. 64. Diakses melalui <http://www.cfr.org/iran/hidden-iran/p111118>.

menelan kerugian dalam kerjasama dengan Argentina, dan Spanyol. Sejak saat itu program pengembangan nuklir berhenti total.

## 2. Regenerasi Program Teknologi Nuklir

Menjelang akhir kekuasaan Khomeini di tahun 1989, terjadi perubahan soal kebijakan nuklir. Khomeini merisaukan dampak dari perang Irak yang terjadi membuat Iran merugi lebih besar. Namun perang yang berkecamuk dengan Irak (1980-1988) dan sebaliknya membuat fasilitas-fasilitas nuklir kembali bangkit.<sup>19</sup> Perang tersebut membuat Iran banyak mengalami kerugian dari beberapa sisi banyak kehilangan karena sumber daya uraniumnya terkuras akibat pengeboman atau penyerangan yang kerap terjadi selama delapan tahun.<sup>20</sup> Maka setelah konstalasi perang yang panjang tersebut Iran merubah pandangan politiknya dan mulai membangun kerjasama geopolitik yang strategis untuk membantu Iran dalam membangun kembali kekuatannya terutama membangun kembali fasilitas nuklir.

Sehingga pada saat itu, Ali Khomeini pun sadar dengan kehilangan ini dan mulai membangun kembali proyek nuklir pada 1990-an. Iran dibantu oleh Tiongkok dan Korea Utara, bantuan yang sekedar persenjataan tapi juga amunisi untuk proyek Bushehar (nuklir). Poer plan akhirnya dibangun di Bushehar dengan kerjasama bersama Siemens dari Jerman dalam rangka, Iran akan menambahkan 23 reaktor nuklir. Pembangunan tersebut berjalan dengan lancar tanpa gangguan

---

<sup>19</sup> Graham, Robert. "Iran: The Illusion of Power". New York S T Martin's Press. 1929 hlm. 169.

<sup>20</sup> Didapat dari: <http://id.wikipedia.org/wiki/Iran> Internet, (Diakses: 3 April 2016, pukul: 19.28 WIB)

hingga bangkit kembali ditahun 1994 bersama dengan dibukanya pusat penelitian nuklir baru dikota Isafahan. Berikutnya menyusul kota bushehr, Natanz, pengembangan fasilitas uranium, Arak, *heavy water production plant*, ditambah lagi dengan adanya penemuan sumber uranium baru dikota Sayhond, provinsi Yanz.<sup>21</sup>

Hal ini akhirnya menjadi dasar kembali bangkitnya nuklir Iran. Meski belum besar, dalam hal ini adalah suatu yang sudah menjadi pijakan berarti untuk pemimpin sesudah Imam Khomeini wafat. Apalagi penerus tersebut tak lain lagi adalah Ali Khameini sendiri. Beliau terpilih sebagai *Supreme Leader* pada 4 Juni 1989 dan membawahi beberapa Presiden yang akhirnya meneruskan kebijakan nuklir Iran hingga saat ini

Secara umum, Kebijakan luar negeri Iran setelah revolusi diatandai dengan kebijakan luar negeri mengarah pada konfrontasi diwilayah Timur Tengah. Para pemimpin baru dimaksudkan untuk melakukan kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan Islam, dan menjadi hegemon regional. Ini termasuk dukungan untuk beberapa gerakan Muslim di negara-negara asing, terutama Lebanon Hizbullah, tetapi juga beberapa gerakan Sunni-Muslim. Secara umum, kebijakan luar negeri mengambil pergeseran ke arah yang lebih anti American dan provokatif terhadap pelaku regional lainnya.<sup>22</sup> Contoh paling jelas dari ini adalah perang dengan Irak

---

<sup>21</sup> Parillo, Jill Merie. "Iran's Nuclear Program". Hlm. 169.

<sup>22</sup> Ehtesmani, A. (2002) The Foreign Policy of Iran, in: The Foreign Policies of Middle East States, red. Dalam Nicolaj Prabo, A NEOCLASSICAL ANALYSIS OF IRANIAN FOREIGN POLICY, diunduh pada



1981-1988. Selain memerangi Sunni-Muslim pemimpin Irak Saddam Hussein, Iran membuat beberapa musuh di wilayah tersebut, dan sampai batas tertentu menggunakan perang proxy dengan Amerika yang mendukung Hussein. Menjelang akhir perang, hanya Suriah, Libya, dan Yaman Selatan dianggap sekutu. Oleh karena itu, Iran mengambil keputusan pragmatis ketika mengakhiri perang, dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara Arab tetangganya tersebut,<sup>23</sup>

### **B. NUKLIR MASA AKBAR HASHEMI RAFSANJANI (1989-1997)**

Pada tahun 1989, Akbar Hashemi Rafsanjani, sebagai tokoh politik pragmatis, terpilih sebagai presiden Iran. Sebagai presiden pragmatis, dibandingkan dengan kaum revolusioner lainnya, ia dianggap ideologi kurang signifikan. Bahkan ia melangkah lebih jauh, dengan tegas menolak slogan, tidak "Baik Timur, maupun Barat," dan berkata, "Kita tidak bisa membangun bendungan dengan slogan". Meskipun nada menenangkan ini, ia membuat pidato yang penuh gairah di Shalat Jumat. Dalam salah satu Shalat Jumat, ia menyatakan, Bagaimana kebijakan luar negeri, harus dikatakan bahwa baik Timur maupun Barat bahwa Republik Islam telah mengumumkan dan slogan yang orang-orang berteriak di jalan-jalan dan demonstrasi, dengan segala cara dalam masyarakat ". Pemerintahannya mengakui bahwa Iran telah membayar harga tinggi karena kebijakan luar negerinya konfrontatif dan dogmatis dan mereka berusaha untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Dengan demikian, Presiden Hashemi Rafsanjani berusaha meyakinkan Barat bahwa Iran adalah negara yang bertanggung jawab

<http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/27495/1/NCR%20analysis%20of%20Iran%20Foreign%20Policy%20.pdf> tanggal 18 Oktober 2016.

<sup>23</sup> ibid

dan serius. Tujuan utama dari pemerintahannya adalah bagaimana mengubah Republik Islam Iran untuk kekuatan regional terbesar, dan ekonomi terkuat di Timur Tengah. Dia sangat percaya bahwa Iran membutuhkan perubahan ekonomi dan membuat keseimbangan antara realisme dan ideologi Islam.

Rafsanjani mengejar dua kebijakan pragmatis termasuk memecahkan masalah ekonomi bahwa perang telah menyebabkan dan meningkatkan hubungan Iran dengan negara-negara lainnya.. Bahkan, pragmatisme Rafsanjani mencoba untuk menjaga sarana listrik dan menghindari memprovokasi ketegangan internasional. Dengan demikian, di satu sisi ia menyatakan secara terbuka Barat adalah jahat dan berbahaya dan di sisi lain ia berpendapat Republik Islam tidak akan mencapai tujuannya kecuali mendapatkan modal Barat untuk pemulihan ekonomi.<sup>24</sup> Beberapa analis politik percaya bahwa Presiden Hashemi Rafsanjani dirasionalisasi dan merevolusi Republik Islam dan melalui programnya liberalisasi ekonomi: valuta asing penataan kembali, politik upah, privatisasi, dan penyesuaian struktural. Sarjana lain seperti Shireen T.Hunter percaya bahwa Presiden Hashemi Rafsanjani mengadopsi kebijakan luar negeri pragmatis meskipun konsisten intra-rezim perbedaan ideologi dan perjuangan kekuasaan.<sup>25</sup>

Bertentangan dengan saingan, Rafsanjani merumuskan kebijakan luar negeri berdasarkan pada tiga prinsip:

---

<sup>24</sup> Seyed Amir Niakooee, 2014, "Foreign Policy and Economic Development: Iran under Rafsanjani" *Iranian Review of Foreign Affairs*, Vol. 5, No. 3, Fall 2014, pp. 179-203.

Diunggah pada  
<http://irfajournal.csr.ir/WebUsers/irfajournal/UploadFiles/OK/1394090214713500009-F.pdf>

<sup>25</sup> *ibid*

1. Iran tidak bisa mengubah peta politik Timur Tengah pesat dan fundamental,
2. Iran harus memberikan keseimbangan kekuatan baru di Timur Tengah yang berlawanan untuk keseimbangan kekuasaan bahwa AS tertarik;
3. Iran harus meningkatkan hubungan politik dengan Arab Saudi karena pentingnya dalam negara Teluk.

Rafsanjani meneruskan dan merevisi kebijakan negaranya soal rencana pembangunan dan rekonstruksi energi dan teknologi nuklir. Seperti yang disampaikan oleh presiden Hashemi Rafsanjani meliputi tiga hal penting, yaitu:

1. Meningkatkan populasi penduduk di Iran
2. Kurangnya pasokan listrik Iran untuk memenuhi kebutuhan warganya
3. Memulai kembali program nuklir Iran yang terhenti akibat insiden-insiden yang tidak diharapkan.

Rafsanjani bahkan mulai menjalin kerjasama dengan beberapa Negara untuk melancarkan tujuannya. Negara-negara itu antara lain, Jerman, Argentina, Spanyol, Ceko, Italia, dan Polandia. Presiden Rafsanjani kemudian melakukan pendekatan dengan *Kraftwerke Union Jerman* untuk menyelesaikan proyek reaktor nuklir Bushehr. Akan tetapi, akibat berada dibawah tekanan Amerika Serikat pihak *Kraftwerk Union Jerman* melakukan penolakan untuk melanjutkan pengembangan reaktor Bushehr. Selanjutnya Iran meminta pemerintah Jerman untuk mengizinkan perusahaan Kraftwerke Union memberikan komponen-komponen reaktor nuklir Bushehr dan data-data dokumentasi teknis yang telah

dibayarkan Iran seperti yang telah disepakati pada ICC (*Internasional Commerce Commision*) atau komisi perdagangan internasional tahun 1982 yang mana perusahaan Siemens Jerman (*Induk Kraftwerke Union*) bertanggung jawab untuk mengirimkan dan menyerahkan bahan-bahan maupun komponen-komponen bagi kepentingan pembangkit reaktor nuklir Iran yang disimpan diluar Iran. Akan tetapi pemerintah Jerman menolak tuntutan tersebut sebagai jawabannya, kemudian pemerintah Iran mengajukan gugatan kepada ICC pada bulan Januari 1996 dengan meminta tuntutan ganti rugi sebesar 5,4 Juta dollar atas kegagalan Jerman mematuhi kesepakatan pada tahun 1982 itu.<sup>26</sup>

Pada akhir tahun 1980-an sebuah konsorsium perusahaan dari Argentina, Jerman, Spanyol telah mengajukan proposal kepada pemerintah Iran tentang penyelesaian pembangunan reaktor nuklir Bushehr. Tetapi akibat tekanan dari Amerika Serikat terhadap ketiganya maka perjanjian itu batal terlaksana. Tekanan AS juga menghentikan langkah *Spain's national institute of industry and nuclear equipment* (Institut industri peralatan nuklir nasional Spanyol) untuk melanjutkan proyek bushehr pada tahun 1990. Iran juga berusaha untuk memperoleh komponen-komponen bagi reaktor nuklir bushehr, tetapi usahanya selalu dihambat oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1993, Iran juga masih berusaha untuk memperoleh delapan kondensor uap yang dibuat oleh perusahaan Ansaldo, Italia di bawah kontrak dengan *kraftwerk union* namun usahanya tersebut juga dibatalkan oleh pemerintah Italia. Memasuki tahun 1994, Iran juga masih berusaha untuk memperoleh komponen-komponen reaktor nuklir bushehr, diantaranya

<sup>26</sup> Didapat dari: <http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html>bid, "Iran Nuclear Program" Part I (*Its History*) Internet (diakses 8 tanggal July 2014).

dengan Negara Cheko. Perusahaan *skoda plzen* Republik Cheko juga bersedia untuk mensuplai komponen-komponen reaktor ke Iran. Namun karena tekanan AS Cheko pun membatalkan perjanjian tersebut. Iran juga tidak berhasil dalam usahanya untuk membeli sendiri komponen-komponen reaktor nuklir dari reaktor- reaktor yang pembangunannya tidak terselesaikan di Negara Polandia. Untuk menghadapi tekanan Barat, Iran kembali membangun dan memperbaiki hubungan dengan Kuwait dan Arab Saudi. Hubungan Iran. Palestina juga berjalan dengan baik. Ayatullah Khomeini bahkan menyerukan bahwa jihad harus dilakukan untuk memerangi zionis Israel dengan kekuatan militer. Iran secara terbuka menyatakan dukungan politik dan moral termasuk dukungan kepada Gerakan Jihad Islam dan Hamas.<sup>27</sup>

Iran juga memeberikan dukungan serta menjalin hubungan baik dengan Hizbullah terkait serangan kelompok militan yang terorganisasi dengan baik walaupun telah dicatat oleh Barat sebagai kelompok teroris. Iran juga membangun kembali hubungan dengan Irak dengan mengadakan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya .

Selain berhasil membangun diplomasi dengan Negara-negara diwilayah Timur Tengah, Iran juga melakukan kerjasama dengan Negara-negara di Amerika Latin seperti Venezuela, Bolivia, Ekuador, dan Kuba. Kesamaan pola pemikiran Ahmadinejad dengan beberapa pemimpin Amerika Latin seperti Hugo Chaves dan Evo Morales dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin Negara dengan corak kepemimpinan tradisional revolusioner, antikapitalis, dan polulis. Iran

---

<sup>27</sup> Sulaeman, D.Y. (2008). "Ahmadinejad On Palestine". Depok: Pustaka Liman.

membangun kerjasama dengan Negara-negara Amerika Latin dalam bidang ekonomi, militer, dan intelijen. Dalam bidang ekonomi, Iran telah bersepakat dengan Bolivia untuk membangun proyek senilai 1 miliar dollar AS untuk membangun infrastruktur dan sektor kesehatan. Iran dan Bolivia bekerjasama dalam proyek lain dengan nilai 10 miliar dollar AS. Iran juga melakukan investasi cukup tinggi dalam bidang pertambangan dan persenjataan dengan Ekuador. Dalam bidang intelijen, Iran menempatkan penasehat militer dari satuan elit pengawal revolusi di Venezuela.<sup>28</sup> Dalam kaitannya ini, kebijakan politik luar negeri Ahmadinejad selain dalam kerjasama dari berbagai bidang tentu tiada lain juga untuk mendukung pada program nuklir. Pada tahun 1984, di tengah perang dengan Irak, Pusat Penelitian Nuklir Esfahan

Ini menunjukkan tekad rezim Islam untuk mengejar aspirasi nuklir yang diwarisi dari rezim Shah. Dengan bantuan Tiongkok, fasilitas pembuatan bahan bakar dan konversi, yang sangat penting untuk pengayaan uranium, juga dibangun di Esfahan. Pada tahun 1991, Tiongkok dan Iran mengumumkan sebuah kesepakatan untuk memasok Iran dengan reaktor riset 20 MW dari Tiongkok.<sup>29</sup> Pada bulan September 1992, Presiden Rafsanjani melakukan negosiasi dengan Presiden Tiongkok, Zeming untuk membeli satu atau dua 330 MW (e) reaktor; Sebuah kesepakatan tentatif untuk membeli satu reaktor tersebut diumumkan oleh Menteri Pertahanan Iran saat berkunjung ke Beijing. Pengumuman ini

---

<sup>28</sup> Didapat dari: <http://www/okezone.com> Ferida, K. (2012). "Dihujani Sanksi, Presiden Ahmadinejad Kunjungi Amerika Latin". Internet (Diakses: Tanggal 8 April 2016, pukul 19.36 WIB).

<sup>29</sup> Mustafa Kibaroglu, 2007. "Iran's Nuclear Ambitions from a Historical Perspective and the Attitude of the West", Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 2 (Mar., 2007), pp. 223-245 Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.istor.org/stable/4284538>. Hlm.235

menyebabkan demonstrasi AS segera ke China mengakibatkan penangguhan penjualan tersebut. Setelah melakukan upaya selama satu dekade untuk merevitalisasi proyek pembangkit listrik tenaga nuklir mereka yang telah lama terhenti dan memperluas cakupan infrastruktur ilmiah dan teknologi, Iran ditinggalkan bersama Rusia sebagai satu-satunya pemasok potensial utama. Iran telah mengadakan pembicaraan sebelumnya dengan Rusia pada akhir 1980an dan bahkan pada prinsipnya sepakat untuk bekerja sama di bidang nuklir.<sup>30</sup> Presiden Rafsanjani ingat untuk mengambil inisiatif dan berbicara dengan Gorbachev tentang penyelesaian pembangkit listrik Bushehr. Namun kesepakatan mereka tertunda oleh perubahan dramatis yang menyebabkan runtuhnya rezim komunis di Uni Soviet, dan membawa Boris Yeltsin berkuasa sebagai Presiden Federasi Rusia.

### **C. NUKLIR MASA MOHAMMAD KHATAMI (1997-2005)**

Muhammad Khatami mulai menjabat sebagai Presiden pada 2 Agustus 1997. Kemenangan dari Seyyed Mohammad Khatami dalam pemilihan presiden tahun 1997 itu titik balik dalam hubungan Iran dan negara-negara Eropa. Sejak kemenangan revolusi Islam untuk presiden Khatami, Iran telah mengikuti kebijakan ideologis dan realis atau kombinasi dari mereka. Khatami memilih pendekatan reformis yang memiliki dua pilar (Amiri, 2006):

Keputusan Khatami berkunjung ke Barat memperlihatkan keinginannya untuk melepaskan negaranya dari isolasi, terutama yang di lakukan Barat selama ini.

---

<sup>30</sup> ibid

perjalanan Khatami ke Barat tampaknya sebagai realitas atas janji yang dikeluarkan tidak lama setelah terpilih sebagai Presiden, Khatami memang berjanji menjalin hubungan kerja sama dan persahabatan dengan semua Negara dan bangsa di seluruh dunia. Ia juga berjanji mengupayakan perdamaian dan keamanan dunia. Pernyataan Khatami mendapat tanggapan serius, karena hubungan Iran dengan Barat, AS, bahkan dengan negara-negara tetangganya di teluk Persia tidak harmonis, merasa tertekan oleh ancaman Iran untuk mengekspor revolusi Iran.

Khatami mulai menjalankan program-programnya yang ia sampaikan pada waktu kampanye, hal yang menarik bahwa ia mencoba menyampaikan gagasan reformasinya. Pada kesempatan berpidato untuk rakyat AS pada 7 Januari 1998 yang disiarkan langsung oleh jaringan kabel (CNN), Khatami menyesalkan insiden penyanderaan diplomat AS.<sup>31</sup> Peristiwa itu dilakukan mahasiswa militan dukungan Khomeini, yang masih dihormati rakyat Iran. Tujuan Khatami meruntuhkan tembok kecurigaan AS guna memuluskan jalan bagi kemungkinan dialog menuju normalisasi hubungan kedua negara.

Secara umum Kebijakan Luar Negeri di masa pemerintahan Khatami adalah mencoba untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh kebijakan luar negeri di masa Ali Khomeini. Upaya-upaya yang dilakukan adalah: Mempromosikan hubungan Iran dengan negara-negara Eropa, Mempromosikan stabilitas kawasan Timur Tengah, Partisipasi aktif dari Iran di organisasi

---

<sup>31</sup> Mohammad Khatami, *Membangun Dialog Antar Peradaban Mizan*, 1998. h 25



internasional, Rekonstruksi hubungan Iran dengan negara-negara lain, Melindungi identitas dan nilai-nilai nasional, Memberikan lingkungan yang damai di dunia.

Khatami juga menguatkan perannya pada Organisasi Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, dan kerja sama Utara-Selatan. Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah berubah maka Khatami berusaha untuk menghindari prioritas ideologis karena bisa membuat masalah dalam proses meningkatkan hubungan Iran dengan negara-negara lainnya. Selain itu, kebijakan Khatami adalah tanggapan tekanan kebijakan penahanan Amerika Serikat.

Pusat kekuasaan yang berbeda di Iran membuat reformasi sulit di kedua urusan luar negeri dan internal. Tujuan Khatami dalam reformasi politik adalah untuk mengurangi karakter ideologis pemerintah Iran dan memperkuat demokrasi. Akibatnya Khatami bersikeras dewan lokal dan pembentukan institusi sipil. Khatami mencoba untuk membuat keseimbangan kekuasaan antara otoritas presiden, parlemen (Majlis), dewan lokal dan lembaga-lembaga keagamaan. media independen yang menggembirakan dari pemerintah adalah unsur lain dalam proses reformasi politik.

Namun karena ide inilah Khatami terkenal di penjuru dunia karena pemikirannya mengenai '*Dialogue Among Civilization*' yang dipuji oleh banyak pihak sebagai solusi perdamaian dunia. Sehingga hal ini berpengaruh pada berkurangnya kecurigaan AS pada pengembangan nuklir Iran.

Pada tahun 2003 Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengumumkan bahwa negeri mullah itu tak terbukti mengembangkan bom nuklir. Yang mereka

bisa temukan hanyalah indikasi bahwa Iran melakukan proses pengayaan uranium dan memproduksi plutonium.

Bukannya gentar dengan ancaman itu, tiga hari setelah resolusi turun, Khatami menyatakan akan terus melanjutkan program nuklirnya. Iran bukan hanya dapat menjalankan industri pabrik berteknologi tinggi, tapi langkah besar menuju kecenderungan dalam bidang nuklir. Iran terus berbenah dan berkembang dalam hal teknologi pendukung nuklir lainnya yaitu laser. Dalam rentang waktu setahun, Amerika Serikat menghabiskan waktunya untuk menyelidiki seberapa besar perkembangan nuklir Iran. Hingga muncullah laporan pada 15 Agustus 2003 ke kongres Amerika Serikat yang menyebutkan alasan mengapa nuklir Iran membahayakan dan harus segera dihentikan. Menanggapi dari laporan di atas, Iran menentang keharusan menghancurkan fasilitas nuklir yang mereka miliki. Meski sudah ada langkah diplomatis dari Amerika Serikat dengan membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Iran terus melanjutkan program yang ada. Amerika Serikat tidak hilang akal, saat Iran melakukan pemilihan umum untuk menggantikan Sayyed Mohammad Khatami, Amerika Serikat memasukkan mantan Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani sebagai calon suksesor.

Berdasarkan studi literatur yang telah dipaparkan penulis seperti dinamika sejarah perkembangan nuklir Iran di atas, memiliki hubungan antara satu dengan lainnya dan tidak saling bertentangan. Dan untuk menganalisis lebih jauh upaya bagaimana strategi Mahmoud Ahmadinejad dalam menggunakan isu nuklir Iran sebagai pertahanan dan untuk mencapai tujuan Iran.